



Anggota Pansus Pengawasan Validasi Teras Malioboro 2 DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan

Relokasi ke Jalan Ketandan Tak Tepat, Pemborosan Dana Keistimewaan



KRISNADI SETYAWAN

Sumbu filosofi sebagai upaya Gubernur DIY Hamengku Buwono X menjaga nilai kesejarahan dan ekonomi pariwisata di kawasan inti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang di masa lalu dinamakan kuthanegara layak diapresiasi. Meski begitu, tetap harus dikritisi.

"MENGAPA kawasan tersebut perlu menjadi warisan budaya yang wajib dilestarikan dengan segala atribut yang menyertainya?" ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setyawan kemarin (23/11).

Sumbu Filosofi Yogyakarta dibangun dengan makna dan nilai filosofi mendalam. Berbagai naras kawasan Sumbu Filosofi diperkenalkan ke masyarakat sejak tiga tahun terakhir. Mengutip *Conservation Manajemen Plan* yang

diterbitkan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta 2022 memuat secara sosial nilai penting dari Sumbu Filosofi di kawasan Malioboro.

Kendati demikian, salah satu masalah kunci yang menjadi perhatian dalam dokumen *Conservation Manajemen Plan* adalah dipindahkannya semua pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang ruas jalan Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 ■

Baca *Relokasi...* Hal 7



AKTIF TURBA: Krisnadi Setyawan sebagai anggota Pansus Pengawasan Validasi Teras Malioboro 2 giat membangun dialog dengan beragam elemen. Dia ingin Sumbu Filosofi juga menjadi sumbu kerakyatan masyarakat DIY.

Relokasi ke Jalan Ketandan Tak Tepat, Pemborosan Dana Keistimewaan

Sambungan dari hal 1

Keadaan ini membuat kawasan Malioboro kehilangan *sense of place*. Kawasan Malioboro lekat dengan PKL yang menjual kerajinan dan cenderamata di selasar sisi barat dan timur. Kegiatan perniagaan ini telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan kawasan Malioboro. "Relokasi PKL dengan tujuan mengembalikan nilai penting Malioboro justru mengurangi nilai penting lainnya," sesal Krisnadi.

Padahal PKL Malioboro sudah lama menjadi bagian sejarah yang berkelindan dengan perkembangan kawasan Malioboro. PKL mulai ramai sekitar 1970-an. Kemunculan PKL itu bila ditarik ke belakang berawal dari periode sekitar abad ke-18. Kala itu Malioboro mulai ramai dengan kegiatan perniagaan. Papatih Dalem Danoe-redja memberikan izin para abdi dalem membuka warung di kawasan tersebut.

Selain kawasan perniagaan, Malioboro dikenal juga sebagai tempat para seniman dan sastrawan menimba ilmu. Ini terjadi pada periode 1960-an hingga 1970-an. Orang-orang yang belajar seni dan sastra ini menyebut dirinya dengan nama Orang-Orang Malioboro. Salah satu ruang belajar yang paling dikenal adalah Persada Studi Klub. Mereka melakukan kegiatan belajar mengajarnya di lorong-lorong Malioboro setelah para PKL tutup.

Kembali soal relokasi PKL Malioboro. Dilaksanakan hampir bersamaan dengan berakhirnya pandemi telah memukul perekonomian

warga yang menggantungkan hidup dari kawasan Malioboro. Iming-iming Pemprov DIY menyulap Malioboro menjadi seperti *Orchard Road* di Singapura justru bertolak belakang dengan tujuan status *world heritage*.

Upaya pemindahan PKL ke Teras Malioboro 1 dan Malioboro 2 relatif berjalan lancar tanpa gejolak. Itu menunjukkan tanggunya kesabaran warga menghadapi tekanan situasi pascapandemi. Kini ketika PKL baru beradaptasi dengan lingkungan usahanya yang baru, muncul rencana relokasi jilid dua dari Teras Malioboro 2 ke Jalan Ketandan. Tepatnya di belakang Toko Ramayana. Informasi mengemparkan para PKL Teras Malioboro 2 yang baru dua tahun terakhir berusaha membangun pasar baru.

"Belum lagi terkuaknya praktik lapak-lapak pedagang siluman yang ditegarai bukan asli PKL semakin menambah runyam persoalan," ujarnya. Menyikapi kondisi itu, beberapa waktu lalu DPRD Kota Yogyakarta membentuk Pansus Pengawasan Validasi Teras Malioboro 2. Krisnadi duduk sebagai salah satu anggota pansus.

Selama mengadakan pengawasan UPT Kawasan Cagar Budaya/KCB Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta seperti bekerja dalam tekanan. Meredam konflik horizontal antarpedagang di Teras Malioboro 2 agar tidak muncul ke permukaan.

"Tekanan itu sebagai konsekuensi ditetapkannya Sumbu Filosofi sebagai *World Heritage* oleh UNESCO," beber wakil rakyat yang

tinggal di kawasan Rotowijayan, Kraton, Yogyakarta ini.

Diingatkan, relokasi jilid dua Teras Malioboro 2 ke Jalan Ketandan tidak relevan ketika pembangunan *Jogja Planning Gallery* (JPG) sebagai pusat kunjungan wisatawan masa depan. Saat bersamaan para pedagang Teras Malioboro 2 justru "dibuang" ke Jalan Ketandan.

"Kebijakan relokasi pedagang Teras Malioboro 2 ke Jalan Ketandan tidak tepat dari sisi perencanaan tata ruang maupun pemborosan anggaran dana keistimewaan (danais)," paparnya.

Lebih dari itu, yang paling dirugikan adalah para pedagang. Mereka tersingkir dari pasar potensial kunjungan wisatawan ke JPG yang bakal menempati gedung DPRD DIY Jalan Malioboro 54 Yogyakarta.

"Lalu di mana keberpihakan Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk ekonomi rakyat?" tanya Krisnadi.

Dia mengajukan tawaran kompromistis. Pedagang Teras Malioboro 2 bukan dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Ketandan. Tapi mereka diintegrasikan dengan kawasan niaga Teras Malioboro 2 sebagai satu bagian dari JPG. "Ini bertujuan agar nilai lebih ekonomi kawasan baru tetap bisa dirasakan para pedagang kecil," harap anggota dewan berlatar belakang aktivis ini.

Sumbu Filosof harus dikembalikan sebagai sumbu kerakyatan sesuai dengan cita-cita luhur Pangeran Mangkubumi membangun *Ngayogyakarta Hadiningrat* untuk kemakmuran rakyatnya. (kus/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005